

Strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis Dalam Implementasi Program Lingkungan Berkelanjutan: Perspektif Environmental Governance

Ciamis Regency Government Strategy In Implementing Sustainable Environmental Programs: An Environmental Governance Perspective

Mira Rosana

Universitas Pasundan, Indonesia
mira.rosana@unpas.ac.id

Abstract

Environmental issues at the local level are not only related to program effectiveness but also to the government's capacity to establish integrated, collaborative, participatory, and sustainable governance. This study aims to analyze the strategy of the Ciamis Regency Government in implementing sustainable environmental programs from an environmental governance perspective. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through the analysis of policy documents, performance reports, environmental data, and relevant official government sources, and were subsequently analyzed thematically using a deductive-inductive framework. The analysis focuses on six dimensions: policy integration and coherence, institutional capacity and resources, vertical and horizontal coordination, multi-stakeholder collaboration, community participation and empowerment, and monitoring, learning, and program sustainability. The findings indicate that the Ciamis Regency Government's strategy has evolved from a program-based approach toward a more institutionalized pattern of environmental governance. The strengthening of the Environmental Protection and Management Plan (RPPLH), Strategic Environmental Assessment (KLHS), development planning, the Climate Village Program, Reduce-Reuse-Recycle Waste Management Sites (TPS3R), waste banks, source-based waste segregation, and the involvement of communities, schools, businesses, and the wider public demonstrate the growing collaborative capacity of the local government. Improvements in the Environmental Quality Index and the proportion of managed waste further indicate positive implementation outcomes. Nevertheless, several challenges remain, including the quality of environmental monitoring, fragmentation of cross-sectoral coordination, pollution pressures, regulatory changes, land-use conversion, and the need to sustain community participation. The study concludes that Ciamis's relative success is shaped by institutional orchestration and social mobilization, referring to the government's ability to connect policy, institutional capacity, collaboration, public participation, and adaptive learning. This model highlights that local environmental sustainability requires a shift from an administrative achievement orientation toward institutionalized and ecologically outcome-based environmental governance.

Keywords: Environmental Governance; Local Government; Sustainable Development; Community Participation; Collaboration; Ciamis Regency

Abstrak

Permasalahan lingkungan pada tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan efektivitas program, tetapi juga dengan kapasitas pemerintah dalam membangun tata kelola yang terintegrasi, kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam implementasi program lingkungan berkelanjutan melalui perspektif environmental governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja, data lingkungan, serta sumber resmi pemerintah yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik dengan kerangka deduktif-induktif. Analisis difokuskan pada enam dimensi, yaitu integrasi dan koherensi kebijakan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya, koordinasi vertikal dan horizontal, kolaborasi multipihak, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta monitoring, pembelajaran, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis telah berkembang dari pendekatan berbasis program menuju pola tata kelola lingkungan yang lebih terlembaga. Penguatan RPPLH, KLHS, perencanaan pembangunan, Program Kampung Iklim, TPS3R, bank sampah, pemilahan sampah dari sumber, serta pelibatan komunitas, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat memperlihatkan

meningkatkan kapasitas kolaboratif pemerintah daerah. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan proporsi sampah yang tertangani turut menunjukkan capaian implementatif. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kualitas monitoring lingkungan, fragmentasi koordinasi lintas sektor, tekanan pencemaran, perubahan regulasi, alih fungsi lahan, dan kebutuhan menjaga kesinambungan partisipasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan relatif Ciamis dibentuk melalui orkestrasi institusional dan mobilisasi sosial, yakni kemampuan pemerintah menghubungkan kebijakan, kapasitas kelembagaan, kolaborasi, partisipasi publik, dan pembelajaran adaptif. Model tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan daerah memerlukan pergeseran dari orientasi capaian administratif menuju outcome-oriented environmental governance yang terlembaga dan berbasis hasil ekologis.

Kata Kunci: Environmental Governance; Pemerintah Daerah; Pembangunan Berkelanjutan; Partisipasi Masyarakat; Kolaborasi; Kabupaten Ciamis

1. Pendahulua

Persoalan lingkungan hidup pada era pembangunan kontemporer tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis mengenai pencemaran, sampah, kerusakan sumber daya alam, atau perubahan penggunaan lahan. Persoalan lingkungan telah berkembang menjadi persoalan tata kelola yang mempertemukan kepentingan pembangunan ekonomi, kebutuhan sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan pemerintah, kepentingan pelaku usaha, serta keberlanjutan ekosistem dalam satu arena kebijakan yang kompleks. Konsekuensinya, efektivitas kebijakan lingkungan tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan kebijakan, membangun koordinasi antarlembaga, melibatkan masyarakat, mengembangkan kemitraan dengan aktor nonpemerintah, serta memastikan adanya akuntabilitas dan pembelajaran kebijakan secara berkelanjutan. Perspektif *environmental governance* menjadi penting dalam konteks ini karena memandang pengelolaan lingkungan sebagai proses kolektif yang berlangsung lintas aktor, lintas sektor, dan lintas tingkat pemerintahan (Heinen et al., 2022; McNaught, 2024).

Pemerintah daerah menempati posisi strategis dalam arsitektur tata kelola lingkungan karena sebagian besar dampak persoalan ekologis dirasakan secara langsung pada tingkat lokal. Pemerintah daerah sekaligus merupakan aktor yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki kewenangan pelayanan publik, mengelola berbagai instrumen pembangunan daerah, serta menjadi penghubung antara agenda pembangunan nasional dan kebutuhan lokal. Namun, kedekatan tersebut tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan kebijakan lingkungan. Studi Ningrum et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan agenda keberlanjutan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dukungan perencanaan dan kebijakan, kompetensi aktor lokal, serta kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Pivo et al. (2020) juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan lingkungan lokal dipengaruhi secara simultan oleh kepemimpinan, kapasitas organisasi, relasi kekuasaan, karakteristik lingkungan, dan desain inovasi kebijakan. Dengan demikian, keberlanjutan program lingkungan pada tingkat daerah lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara kapasitas pemerintahan, desain institusi, strategi kolaborasi, dan dukungan sosial daripada sebagai produk intervensi pemerintah secara unilateral.

Kompleksitas tersebut semakin penting dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik ekologis dan sosial lokal, tetapi pada saat yang sama dapat melahirkan fragmentasi kelembagaan, perbedaan kapasitas antardaerah, ketidaksinkronan kebijakan, dan lemahnya koordinasi vertikal

maupun horizontal. Hamilton et al. (2021) menunjukkan bahwa kesenjangan kolaborasi (*collaboration gaps*) di antara organisasi yang saling bergantung dapat menghambat pencapaian tujuan tata kelola lingkungan, bahkan ketika para aktor tersebut berada dalam wilayah kebijakan yang sama. Dalam konteks Indonesia, Ratnasari et al. (2023) menemukan bahwa ketidaksinkronan penerjemahan kebijakan antara tingkat nasional dan daerah masih menjadi persoalan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Temuan yang lebih mutakhir dari Muallidin (2026) bahkan menunjukkan bahwa problem tata kelola lingkungan pada pemerintah daerah Indonesia tidak selalu semata-mata bersumber dari kekurangan kapasitas, tetapi dapat berakar pada arsitektur kelembagaan yang belum mampu membangun respons ekologis secara efektif. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program lingkungan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah program atau capaian administratif, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang menopang program tersebut.

Kabupaten Ciamis memberikan konteks empiris yang menarik untuk mengkaji persoalan tersebut. Secara normatif, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah memiliki landasan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkembangan implementasinya, daerah ini menunjukkan sejumlah capaian yang cukup menonjol. Data Open Data Jawa Barat mencatat sebanyak 28 lokasi Kampung Iklim di Kabupaten Ciamis pada 2024. Kabupaten Ciamis juga memperoleh Anugerah Adipura Kencana sebagai salah satu capaian lingkungan tingkat nasional dan pada 2025 kembali memperoleh penghargaan sebagai Pembina Program Komunitas untuk Iklim tingkat nasional, sementara Dusun Nagrog, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing memperoleh penghargaan ProKlim Lestari. Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa agenda lingkungan di Kabupaten Ciamis telah berkembang dari sekadar pelaksanaan tugas administratif menuju berbagai program yang melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, dan institusi lokal. Namun, pencapaian formal tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan akademik yang lebih substantif: strategi tata kelola seperti apa yang memungkinkan berbagai program tersebut dijalankan, bagaimana hubungan antaraktor dibangun, dan sejauh mana keberhasilan tersebut mencerminkan pelembagaan prinsip-prinsip *environmental governance*?

Pertanyaan tersebut penting karena penghargaan, keberadaan regulasi, maupun banyaknya program belum cukup untuk menjelaskan keberlanjutan suatu kebijakan lingkungan. Tata kelola lingkungan yang efektif membutuhkan keterhubungan antara tindakan pemerintah dengan partisipasi publik. Wu et al. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lingkungan regional tidak hanya dipengaruhi oleh investasi, regulasi, dan penegakan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat serta koordinasi antara pemerintah dan aktor publik. Pada tingkat pemerintah daerah, kapasitas untuk melibatkan warga juga tidak terbentuk secara otomatis. Glaas et al. (2022) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam transformasi kebijakan lingkungan membutuhkan kapasitas organisasi, mekanisme partisipatif, kemampuan membangun jejaring, serta pembagian peran yang jelas. Artinya, masyarakat dalam *environmental governance* tidak ditempatkan hanya sebagai penerima atau objek program, tetapi sebagai aktor yang memiliki pengetahuan lokal, sumber daya sosial, kapasitas inovasi, serta kemampuan untuk mempertahankan keberlanjutan program setelah intervensi pemerintah berakhir.

Perspektif *environmental governance* karena itu menawarkan kerangka yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Perspektif ini memungkinkan analisis bergerak melampaui pertanyaan apakah suatu program telah dilaksanakan menuju pertanyaan mengenai bagaimana program tersebut ditata dan dipertahankan. Dimensi yang relevan mencakup integrasi dan koherensi kebijakan; koordinasi vertikal dan horizontal antarlembaga; kapasitas institusional dan mobilisasi sumber daya; keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan; transparansi dan akuntabilitas; kepemimpinan; serta kemampuan melakukan adaptasi dan pembelajaran kebijakan. Heinen et al. (2022) menunjukkan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan pendekatan *polycentric* dan *multilevel governance* karena kewenangan, sumber daya, dan kemampuan bertindak tersebar pada berbagai tingkat dan aktor. Sementara itu, McNaught (2024) menemukan bahwa efektivitas kolaborasi lingkungan pada tingkat lokal sangat bergantung pada keluasan keterlibatan aktor, desain kelembagaan, fasilitasi, kemampuan berbagi sumber daya dan pengetahuan, serta kepemimpinan kolaboratif. Dengan demikian, strategi pemerintah daerah dapat dipahami sebagai kemampuan mengorkestrasi berbagai instrumen dan aktor untuk menghasilkan tindakan kolektif yang konsisten dengan tujuan keberlanjutan.

Meskipun kajian mengenai tata kelola lingkungan terus berkembang, terdapat ruang penelitian yang masih memerlukan pendalaman. Pertama, berbagai penelitian mengenai lingkungan di tingkat lokal cenderung terfragmentasi berdasarkan isu tertentu, seperti pengelolaan sampah, perubahan iklim, sumber daya air, atau adaptasi bencana, sementara keterhubungan antarprogram dalam satu arsitektur strategi pemerintah daerah belum selalu mendapat perhatian yang sebanding. Kedua, kajian di Indonesia masih banyak menekankan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi atau persoalan kapasitas pemerintah daerah (Ratnasari et al., 2023; Muallidin, 2026), sedangkan daerah yang menunjukkan capaian lingkungan relatif menonjol belum banyak digunakan sebagai kasus untuk memahami bagaimana konfigurasi strategi, kelembagaan, partisipasi, dan kolaborasi dapat menghasilkan praktik tata kelola yang relatif berhasil. Ketiga, keberhasilan daerah sering kali direpresentasikan melalui indikator program dan penghargaan, sementara proses pemerintahan yang membentuk keberhasilan tersebut—termasuk koordinasi lintas perangkat daerah, mobilisasi masyarakat, pembentukan jejaring, kepemimpinan, mekanisme insentif, serta kesinambungan program—masih memerlukan penjelasan empiris yang lebih mendalam.

Atas dasar kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis arsitektur strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam implementasi program lingkungan berkelanjutan, bukan sekadar menginventarisasi program maupun mengevaluasi pencapaian administratifnya. Penelitian menempatkan strategi pemerintah sebagai proses yang mencakup penetapan arah kebijakan, integrasi program, penguatan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, pengembangan kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan pembelajaran kebijakan. Melalui perspektif *environmental governance*, penelitian juga berupaya menjelaskan hubungan antara kapasitas pemerintah dengan kemampuan membangun tindakan kolektif di antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas lingkungan, dunia usaha, dan aktor lainnya. Posisi tersebut memungkinkan penelitian memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan

sekaligus mengidentifikasi titik kerentanan yang dapat memengaruhi keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan program lingkungan berkelanjutan berdasarkan perspektif *environmental governance* serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi keberlanjutan implementasinya. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian *environmental governance* dengan memberikan bukti empiris dari pemerintahan kabupaten dalam konteks desentralisasi Indonesia. Secara praktis, penelitian diharapkan menghasilkan pembelajaran kebijakan mengenai bagaimana prestasi lingkungan dapat ditransformasikan menjadi kapasitas institusional dan praktik tata kelola yang berkelanjutan, sehingga keberhasilan program tidak bergantung pada momentum, figur kepemimpinan, ataupun penghargaan tertentu, melainkan terlembagakan dalam sistem pemerintahan daerah dan perilaku kolektif masyarakat.

2. Kajian Pustaka

Environmental Governance

Environmental governance berkembang dari pemahaman bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kewenangan hierarkis pemerintah. Kompleksitas permasalahan ekologis menuntut keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, maupun organisasi nonpemerintah dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam perspektif ini, pemerintah tetap memegang peran penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pengambilan keputusan. Heinen et al. (2022) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan kontemporer memiliki karakter *polycentric* dan *multi-level*, karena kewenangan dan tindakan lingkungan tersebar pada berbagai tingkatan pemerintahan dan aktor yang saling bergantung. Dengan demikian, efektivitas *environmental governance* ditentukan oleh kemampuan membangun keterhubungan antara institusi, aktor, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pemerintah daerah, *environmental governance* juga menekankan pentingnya kualitas institusi dan kemampuan mentransformasikan komitmen lingkungan ke dalam tindakan substantif. Wu et al. (2020) menunjukkan bahwa kualitas lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh investasi, regulasi, dan penegakan hukum pemerintah, tetapi juga oleh koordinasi antara tata kelola pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pada konteks Indonesia, Muallidin (2026) memperingatkan bahwa mandat formal lingkungan belum tentu menghasilkan respons ekologis apabila arsitektur kelembagaan masih mengalami fragmentasi, kepatuhan simbolik, dan kelembaman birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memandang *environmental governance* sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan, institusi, aktor, sumber daya, serta partisipasi masyarakat menuju pencapaian tujuan lingkungan secara berkelanjutan.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Program Lingkungan Berkelanjutan

Strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan tidak cukup dipahami sebagai kumpulan program atau kegiatan tahunan, tetapi sebagai serangkaian pilihan kebijakan yang menghubungkan tujuan, kelembagaan, sumber daya, aktor, dan mekanisme implementasi. Pivo et al. (2020) mengidentifikasi bahwa perubahan kebijakan lingkungan lokal dipengaruhi oleh kombinasi faktor tata kelola, konteks

lingkungan, dan desain inovasi. Kepemimpinan, kapasitas organisasi, distribusi kekuasaan, kolaborasi, serta kemampuan menyesuaikan inovasi dengan kondisi lokal menjadi elemen yang menentukan apakah kebijakan lingkungan mampu menghasilkan perubahan nyata. Dengan demikian, strategi pemerintah daerah membutuhkan konsistensi antara formulasi kebijakan dan kapasitas untuk menjalankannya.

Keberhasilan strategi lingkungan juga membutuhkan keberlanjutan sumber daya dan dukungan institusional. Berdasarkan kajian terhadap 87 kasus implementasi agenda keberlanjutan lokal, Ningrum et al. (2022) menemukan bahwa ketersediaan sumber daya, praktik perencanaan dan kebijakan yang mendukung, kompetensi aktor lokal, serta kepercayaan antaraktor merupakan faktor penting keberhasilan keberlanjutan pada tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, Ratnasari et al. (2023) menunjukkan pentingnya koherensi antara kebijakan nasional dan daerah karena keterlambatan atau ketidaktepatan penerjemahan kebijakan pada tingkat lokal dapat mengurangi efektivitas agenda keberlanjutan. Atas dasar itu, strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dianalisis melalui kemampuan mengintegrasikan arah kebijakan, program, sumber daya, kapasitas organisasi, serta hubungan antartingkat pemerintahan.

Collaborative dan Multi-Level Environmental Governance

Persoalan lingkungan memiliki karakter lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kewenangan sehingga sulit diselesaikan oleh satu organisasi secara mandiri. *Multi-level governance* menjelaskan pentingnya keterhubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, sedangkan pendekatan *polycentric governance* memberikan perhatian terhadap keberadaan berbagai pusat pengambilan keputusan yang relatif otonom tetapi saling berinteraksi (Heinen et al., 2022). Bagi pemerintah kabupaten, pendekatan tersebut berarti keberhasilan program lingkungan bergantung pada kemampuannya menjembatani kebijakan vertikal sekaligus membangun koordinasi horizontal dengan perangkat daerah dan aktor nonpemerintah.

Kolaborasi tersebut tidak otomatis terbentuk hanya karena para aktor memiliki kepentingan lingkungan yang sama. Hamilton et al. (2021) menemukan adanya *collaboration gaps* dalam sistem tata kelola lingkungan ketika aktor-aktor yang memiliki ketergantungan dan yurisdiksi yang saling beririsan justru tidak berkolaborasi secara efektif. McNaught (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* pada tingkat lokal dipengaruhi oleh keluasaan keterlibatan pemangku kepentingan, kemampuan berbagi pengetahuan dan sumber daya, kepemimpinan, fasilitasi, serta kesediaan berbagi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kualitas kolaborasi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari banyaknya aktor yang dilibatkan, tetapi dari intensitas koordinasi, kejelasan peran, pertukaran sumber daya, dan keberlanjutan hubungan di antara para aktor.

Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu fondasi penting *environmental governance* karena keberlanjutan program lingkungan sangat dipengaruhi oleh perilaku dan tindakan kolektif masyarakat. Partisipasi tidak seharusnya dibatasi pada kehadiran masyarakat dalam kegiatan pemerintah, tetapi mencakup keterlibatan

dalam identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi program. Wu et al. (2020) membuktikan bahwa partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan memiliki efek yang semakin kuat ketika berjalan secara terkoordinasi dengan tindakan pemerintah. Perspektif ini menempatkan masyarakat sebagai *co-producer* dalam tata kelola lingkungan, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.

Namun, partisipasi yang bermakna membutuhkan kapasitas kelembagaan pemerintah untuk membuka ruang keterlibatan publik. Glaas et al. (2022) menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam membangun partisipasi warga dipengaruhi oleh struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, mekanisme keterlibatan, serta kemampuan menghubungkan masukan masyarakat dengan proses kebijakan. McNaught (2024) menambahkan bahwa pengakuan terhadap beragam pengetahuan dan perspektif lokal dapat memperkuat hasil kolaborasi dan proses pembelajaran sosial. Oleh sebab itu, penelitian terhadap Kabupaten Ciamis perlu melihat apakah masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan lingkungan atau telah memperoleh ruang untuk memengaruhi arah, desain, serta keberlanjutan program.

Kapasitas Kelembagaan dan Keberlanjutan Implementasi

Kapasitas kelembagaan menentukan kemampuan pemerintah mengubah kebijakan lingkungan dari komitmen normatif menjadi praktik yang berkelanjutan. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya, struktur koordinasi, kepemimpinan, pengetahuan, jejaring, serta mekanisme perencanaan dan evaluasi. Ningrum et al. (2022) menempatkan sumber daya yang dapat diandalkan dan kompetensi aktor lokal sebagai faktor penting bagi keberlanjutan program, sedangkan Glaas et al. (2022) menunjukkan bahwa fragmentasi tanggung jawab dan lemahnya integrasi antarkebijakan dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah membangun perubahan transformatif.

Dalam konteks Indonesia, persoalan kelembagaan bahkan dapat melampaui keterbatasan sumber daya. Muallidin (2026) menunjukkan bahwa kegagalan ekologis pemerintah daerah dapat muncul melalui *symbolic compliance*, *structural disjunction*, dan *inertial governance*, yakni kondisi ketika aktivitas administratif tetap berjalan tetapi tidak menghasilkan transformasi ekologis yang substantif. Pandangan ini penting untuk penelitian di Kabupaten Ciamis karena keberhasilan program tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, jumlah kegiatan, atau penghargaan yang diperoleh. Keberlanjutan justru perlu ditinjau dari sejauh mana program telah terintegrasi dalam kelembagaan, perencanaan, pembiayaan, jejaring aktor, sistem evaluasi, dan perilaku masyarakat sehingga mampu bertahan melampaui perubahan kepemimpinan maupun momentum program tertentu.

Sintesis Kajian dan Kerangka Analisis Environmental Governance

Berdasarkan literatur tersebut, keberhasilan implementasi program lingkungan berkelanjutan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara strategi pemerintah dan kualitas tata kelola lingkungan. Literatur sebelumnya memperlihatkan bahwa keberhasilan lokal ditentukan oleh kapasitas organisasi dan desain kebijakan (Pivo et al., 2020), sumber daya dan kompetensi aktor (Ningrum et al., 2022), koherensi kebijakan antartingkat pemerintahan (Ratnasari et al., 2023), koordinasi dalam sistem tata kelola yang terfragmentasi (Hamilton et al., 2021), partisipasi warga (Glaas et al.,

2022; Wu et al., 2020), serta kualitas kolaborasi multipihak (McNaught, 2024). Sementara itu, Muallidin (2026) memberikan perspektif kritis bahwa kapasitas formal belum cukup apabila struktur institusi justru menghasilkan kepatuhan simbolik dan tidak mendorong perubahan ekologis.

Atas dasar sintesis tersebut, penelitian ini menggunakan enam dimensi analitis utama, yaitu (1) integrasi dan koherensi kebijakan; (2) kapasitas kelembagaan dan mobilisasi sumber daya; (3) koordinasi vertikal dan horizontal; (4) kolaborasi multipihak; (5) partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; serta (6) monitoring, pembelajaran, dan keberlanjutan program. Keenam dimensi tersebut digunakan untuk menjelaskan bukan hanya *apa* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis, tetapi bagaimana strategi pemerintah dibangun, bagaimana hubungan antaraktor dikelola, dan bagaimana praktik tersebut dilembagakan untuk menjamin keberlanjutan program lingkungan. Kerangka ini sekaligus membedakan penelitian dari pendekatan yang hanya mengevaluasi keluaran administratif atau pencapaian program lingkungan.

3. Metode

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan program lingkungan berkelanjutan. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan penelitian mengeksplorasi secara komprehensif suatu fenomena tata kelola dalam konteks institusional, sosial, dan kebijakan yang nyata. Studi kasus juga relevan ketika fokus penelitian diarahkan bukan semata-mata pada keluaran kebijakan, tetapi pada proses, hubungan antaraktor, mekanisme koordinasi, dan kondisi kontekstual yang membentuk implementasi kebijakan tersebut (Ridder, 2017). Dalam penelitian ini, Kabupaten Ciamis diposisikan sebagai *bounded case*, sedangkan strategi pemerintah dalam implementasi program lingkungan berkelanjutan menjadi fenomena utama yang dianalisis melalui perspektif *environmental governance*.

Pemilihan Kabupaten Ciamis sebagai kasus dilakukan secara purposif karena daerah tersebut menunjukkan kombinasi yang menarik antara komitmen kebijakan, kelembagaan lingkungan, pelaksanaan berbagai program berbasis masyarakat, serta capaian lingkungan pada tingkat daerah dan nasional. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan hanya berdasarkan penghargaan atau pencapaian administratif, tetapi untuk mengidentifikasi proses tata kelola yang berada di balik capaian tersebut, termasuk bagaimana pemerintah mengintegrasikan kebijakan, mengoordinasikan aktor, memobilisasi sumber daya, membangun partisipasi masyarakat, serta mempertahankan keberlanjutan program.

Lokasi dan Unit Analisis

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dengan perhatian utama pada ekosistem kebijakan lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Unit analisis penelitian adalah strategi tata kelola Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam implementasi program lingkungan berkelanjutan, bukan organisasi pemerintah secara individual. Dengan demikian, analisis meliputi hubungan antara kebijakan, institusi, program, aktor pemerintah, pemerintah desa, komunitas, masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan program lingkungan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis ditempatkan sebagai salah satu sumber informasi utama karena merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi langsung dalam urusan lingkungan hidup. Untuk memperoleh gambaran tata kelola yang lebih utuh, penelitian juga menjangkau perangkat daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan, pemerintah kecamatan/desa, kelompok masyarakat pelaksana program lingkungan, serta aktor nonpemerintah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Ciamis.

Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan tingkat pengetahuan, kewenangan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam perencanaan maupun implementasi program lingkungan berkelanjutan. Pemilihan informan tidak didasarkan pada representasi statistik, melainkan pada kemampuan informan menyediakan informasi yang kaya dan relevan terhadap pertanyaan penelitian. Prinsip ini sejalan dengan konsep *information power*, yaitu semakin spesifik dan relevan pengetahuan informan terhadap tujuan penelitian, semakin besar kontribusi informasinya terhadap kedalaman analisis (Malterud et al., 2016).

Informan penelitian mencakup lima kelompok utama, yaitu: (1) pejabat dan pelaksana teknis DPRKPLH Kabupaten Ciamis; (2) unsur perangkat daerah yang berkaitan dengan perencanaan dan integrasi pembangunan daerah; (3) pemerintah kecamatan dan/atau desa yang menjadi lokasi implementasi program lingkungan; (4) pengurus komunitas, kelompok masyarakat, atau pelaksana Program Kampung Iklim dan program lingkungan berbasis masyarakat lainnya; serta (5) pemangku kepentingan eksternal, seperti akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi masyarakat, atau aktor lain yang memiliki keterlibatan substantif dalam agenda lingkungan Kabupaten Ciamis.

Rekrutmen informan dilakukan secara bertahap dan dapat dikembangkan melalui *snowball sampling* apabila wawancara awal mengidentifikasi aktor lain yang memiliki informasi strategis. Kecukupan informan ditentukan berdasarkan *information power* dan kejenuhan tematik (*thematic saturation*), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi substantif atau tema baru yang relevan. Pendekatan ini lebih tepat dalam penelitian kualitatif daripada menentukan ukuran sampel melalui formula statistik. Hennink dan Kaiser (2022) menunjukkan bahwa kecukupan wawancara sangat bergantung pada homogenitas partisipan, keluasan tujuan, serta kompleksitas fenomena yang diteliti, sedangkan Guest et al. (2020) menekankan pentingnya pelaporan kejenuhan data secara transparan.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai teknik utama karena memungkinkan peneliti mempertahankan fokus pada dimensi *environmental governance* sekaligus memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, dinamika, persoalan, dan praktik yang tidak diprediksi sebelumnya. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian, kajian literatur,

dan enam dimensi analisis yang telah ditetapkan. Pengembangan pertanyaan dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kejelasan pertanyaan, relevansi terhadap pengetahuan informan, serta fleksibilitas untuk melakukan *probing* terhadap isu penting yang muncul selama wawancara (Kallio et al., 2016).

Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik implementasi program, interaksi antaraktor, fasilitas lingkungan, aktivitas masyarakat, maupun bentuk nyata program pada lokasi yang relevan. Catatan lapangan digunakan untuk merekam situasi, aktivitas, interaksi, dan konteks yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui wawancara. Kombinasi wawancara dan observasi memungkinkan penelitian membandingkan narasi aktor dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Analisis dokumen digunakan untuk menelusuri kesinambungan antara desain kebijakan dan praktik implementasinya. Dokumen yang dianalisis antara lain RPJMD Kabupaten Ciamis 2025–2029, RPJPD Kabupaten Ciamis 2025–2045, RPPLH, dokumen KLHS, rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah, LKIP DPRKPLH, indikator kinerja utama, regulasi daerah, dokumen Program Kampung Iklim, serta laporan atau dokumentasi program lingkungan yang relevan. Analisis dokumen dilakukan secara sistematis melalui tahapan penyiapan dokumen, ekstraksi informasi, analisis isi, dan penyaringan temuan sebagaimana prinsip *READ approach* yang dikembangkan Dalglish et al. (2020). Dokumen tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi sekunder, tetapi juga sebagai alat untuk menguji konsistensi antara kebijakan formal, pernyataan informan, dan praktik implementasi.

Fokus dan Dimensi Analisis

Kerangka analisis penelitian dibangun secara deduktif–induktif. Secara deduktif, proses pengumpulan dan pengodean awal dipandu oleh konsep *environmental governance* yang telah disintesis dalam kajian pustaka. Secara induktif, penelitian tetap membuka kemungkinan munculnya pola, strategi, faktor, atau hubungan baru dari data lapangan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam kerangka awal. Pendekatan ini penting agar teori berfungsi sebagai *analytical lens* tanpa membatasi kemampuan penelitian menangkap karakteristik khas tata kelola lingkungan Kabupaten Ciamis.

Tabel 1. Dimensi dan Fokus Analisis Environmental Governance

Dimensi analisis	Fokus empiris
Integrasi dan koherensi kebijakan	Keselarasan agenda lingkungan dengan RPJMD, RPPLH, KLHS, perencanaan sektoral, dan kebijakan desa
Kapasitas kelembagaan dan sumber daya	SDM, pembiayaan, kewenangan, pengetahuan, infrastruktur, kepemimpinan, dan kemampuan organisasi
Koordinasi vertikal dan horizontal	Hubungan pusat–provinsi–kabupaten–kecamatan–desa serta koordinasi antarperangkat daerah
Kolaborasi multipihak	Pola kemitraan pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan aktor lainnya
Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, inovasi, dan pemeliharaan program

Monitoring, pembelajaran, dan keberlanjutan	Evaluasi program, penggunaan hasil monitoring, adaptasi kebijakan, replikasi praktik baik, dan pelembagaan program
---	--

Keenam dimensi tersebut tidak diperlakukan sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai elemen yang saling berinteraksi. Analisis diarahkan untuk menemukan konfigurasi strategi, yaitu bagaimana kombinasi kapasitas pemerintah, koordinasi, kolaborasi, partisipasi, dan pembelajaran menghasilkan atau justru membatasi keberlanjutan implementasi program lingkungan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) melalui proses yang bersifat iteratif. Analisis dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung agar temuan awal dapat digunakan untuk memperdalam wawancara berikutnya. Tahapan analisis meliputi: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen; (2) pemberian kode awal; (3) pengelompokan kode berdasarkan pola dan keterkaitan makna; (4) pembentukan tema sementara; (5) penelaahan tema dengan membandingkan antarinforman dan antarsumber data; (6) pendefinisian dan penamaan tema; serta (7) penyusunan interpretasi yang menghubungkan temuan empiris dengan perspektif *environmental governance*. Prosedur tersebut sejalan dengan prinsip analisis tematik yang menekankan keterlibatan aktif peneliti dalam mengembangkan pola makna yang koheren dan relevan dengan pertanyaan penelitian (Braun & Clarke, 2021).

Pengodean dilakukan dengan strategi deduktif-induktif. Kode deduktif berasal dari enam dimensi *environmental governance*, sedangkan kode induktif dikembangkan berdasarkan fenomena yang muncul dari data. Selanjutnya dilakukan *cross-source comparison* untuk membandingkan informasi antara pejabat pemerintah, pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan dokumen kebijakan. Teknik ini memungkinkan penelitian tidak hanya menemukan kesesuaian informasi tetapi juga mengidentifikasi perbedaan persepsi, ketegangan, kesenjangan implementasi, serta kemungkinan adanya praktik informal yang tidak terlihat dalam dokumen resmi.

Proses analisis akhirnya diarahkan untuk menghasilkan tiga tingkat temuan: deskriptif, yaitu strategi dan program yang dilaksanakan; analitis, yaitu mekanisme tata kelola yang menjelaskan bagaimana strategi tersebut bekerja; dan interpretatif, yaitu penjelasan mengenai faktor yang membuat praktik *environmental governance* di Kabupaten Ciamis mampu atau belum mampu menghasilkan keberlanjutan program. Struktur analisis tersebut diharapkan memberikan kedalaman pembahasan dan mencegah hasil penelitian berhenti pada inventarisasi kegiatan pemerintah.

Keabsahan dan Kepercayaan Data

Kualitas penelitian dijaga melalui prinsip *credibility*, *dependability*, *confirmability*, dan *transferability*. *Credibility* diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan wawancara dari berbagai kategori informan, observasi, serta dokumen resmi. Temuan atau interpretasi yang bersifat strategis dikonfirmasi kembali terhadap sumber yang relevan melalui *member checking* atau klarifikasi lanjutan apabila terdapat informasi yang tidak konsisten. *Dependability* dijaga melalui dokumentasi tahapan penelitian, pedoman wawancara, proses pengodean, perubahan kategori, dan keputusan analitis dalam bentuk *audit trail*. *Confirmability* diperkuat dengan mempertahankan hubungan yang dapat ditelusuri

antara data mentah, kode, tema, dan kesimpulan, sementara *transferability* didukung melalui penyajian deskripsi kontekstual yang memadai mengenai karakteristik tata kelola lingkungan Kabupaten Ciamis. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi Nowell et al. (2017) bahwa analisis tematik yang berkualitas perlu dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan dapat ditelusuri.

Triangulasi tidak digunakan semata-mata untuk mencari keseragaman jawaban. Perbedaan antara dokumen resmi, persepsi pemerintah, dan pengalaman masyarakat diperlakukan sebagai data analitis yang penting karena dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara desain dan implementasi kebijakan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat menghasilkan penjelasan yang lebih seimbang mengenai capaian, keterbatasan, konflik kepentingan, maupun tantangan keberlanjutan program lingkungan.

Etika Penelitian

Penelitian memperhatikan prinsip etika penelitian sosial dengan memberikan informasi kepada setiap informan mengenai tujuan penelitian, bentuk keterlibatan, penggunaan informasi, serta hak untuk tidak menjawab atau menghentikan keterlibatan dalam penelitian. Persetujuan informan diperoleh sebelum wawancara dan perekaman dilakukan. Identitas informan dapat disamarkan melalui kode sesuai kebutuhan, terutama untuk informasi yang berkaitan dengan evaluasi kelembagaan, kendala koordinasi, atau kritik terhadap implementasi kebijakan. Seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan penelitian dan disimpan secara aman guna menjaga kerahasiaan serta integritas informasi.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis terhadap dokumen perencanaan, laporan kinerja, data lingkungan, serta bukti implementasi program menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan tidak berdiri pada satu instrumen kebijakan. Strategi tersebut membentuk konfigurasi tata kelola yang meliputi integrasi agenda lingkungan ke dalam perencanaan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antartingkat pemerintahan, perluasan kolaborasi, pelebagaan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pembelajaran kebijakan. Temuan juga memperlihatkan bahwa capaian lingkungan Kabupaten Ciamis merupakan hasil proses yang berkembang secara bertahap dan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural maupun operasional.

Perkembangan Kinerja Lingkungan Kabupaten Ciamis

Data kinerja lingkungan menunjukkan kecenderungan perbaikan dalam sejumlah indikator utama. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 55,21 pada 2019 menjadi 62,13 pada 2020, 63,46 pada 2021, 68,73 pada 2022, dan 70,76 pada 2023. Pada periode yang sama, persentase timbulan sampah yang tertangani meningkat dari 19,95% pada 2019 menjadi 40,48% pada 2023. Perubahan juga terlihat dalam penguatan instrumen tata kelola: dokumen RPPLH mulai tercatat tersedia sejak 2022, sedangkan KLHS telah terselenggara secara konsisten sejak 2020.

Tabel 2. Perkembangan Beberapa Indikator Lingkungan Kabupaten Ciamis

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Kecenderungan
-----------	------	------	------	------	------	---------------

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,21	62,13	63,46	68,73	70,76	Meningkat
Indeks Kualitas Air	59,60	59,67	62,44	60,26	60,34	Fluktuatif
Sampah yang tertangani (%)	19,95	27,32	28,00	39,96	40,48	Meningkat
Ketersediaan RPPLH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Menguat
Pelaksanaan KLHS	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Konsisten

Sumber: Diolah dari RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

Peningkatan indikator tersebut diperkuat oleh capaian yang muncul pada periode berikutnya. Data Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat 28 lokasi Kampung Iklim di Kabupaten Ciamis pada 2024. LKIP DPRKPLH juga mencatat berbagai penghargaan nasional pada 2024, antara lain Adipura Kencana, Nirwasita Tantra, tiga Sekolah Adiwiyata Mandiri, serta ProKlim Lestari. Pada 2025, Kabupaten Ciamis memperoleh pengakuan ASEAN *Environmentally Sustainable Cities* kategori Clean Land, sedangkan pada Anugerah ProKlim 2025 Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali memperoleh penghargaan Pembina ProKlim tingkat nasional dan Dusun Nagrog, Desa Kertabumi, memperoleh kategori ProKlim Lestari.

Tabel 3. Capaian Utama Implementasi Program Lingkungan

Aspek	Bukti empiris	Makna awal terhadap environmental governance
Kampung Iklim	28 lokasi pada 2024	Perluasan aksi lingkungan berbasis komunitas
Adipura Kencana	Capaian nasional 2024	Pengakuan terhadap tata kelola kebersihan dan lingkungan
ProKlim	Pembina ProKlim Nasional 2025 dan ProKlim Lestari Dusun Nagrog	Keterhubungan pemerintah daerah dan komunitas
ASEAN ESC	Pengakuan kategori <i>Clean Land</i> 2025	Pengakuan praktik lingkungan pada tingkat regional
Infrastruktur sosial persampahan	298 unit TPS3R dan bank sampah dilaporkan dalam praktik pengelolaan Ciamis	Desentralisasi pengelolaan menuju sumber dan komunitas
Sampah menuju TPA	Sekitar 45 truk/hari pada 2019 menjadi 9 truk/hari pada 2024	Indikasi penguatan pengurangan dan pengolahan pada sumber

Sumber: Diolah dari Open Data Jawa Barat dan KLH/BPLH.

Integrasi dan Koherensi Kebijakan Lingkungan

Temuan pertama menunjukkan adanya kecenderungan pelembagaan agenda lingkungan ke dalam sistem perencanaan daerah. Keberadaan RPPLH, pelaksanaan KLHS, RPJMD 2025–2029, serta IKU DPRKPLH 2025–2029 menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak semata-mata ditempatkan sebagai aktivitas teknis sebuah

perangkat daerah. RPJMD 2025–2029 telah ditetapkan sebagai kerangka pembangunan lima tahunan yang harus menjadi rujukan bagi Renstra perangkat daerah dan RKPD, sedangkan IKU DPRKPLH secara eksplisit menempatkan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai tujuan organisasi.

Integrasi tersebut terlihat pula dari keluasan instrumen yang dikelola DPRKPLH, meliputi RPPLH, KLHS, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, pengaduan masyarakat, pengawasan usaha/kegiatan, hingga monitoring dan penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, strategi Ciamis memperlihatkan pergeseran dari pendekatan yang bersifat *program-based* menuju pendekatan yang lebih *institution-based*. Agenda lingkungan mulai memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan, indikator kinerja, mekanisme pengawasan, dan sistem akuntabilitas.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Penguatan kapasitas kelembagaan tercermin dari keberadaan struktur organisasi dan fungsi teknis DPRKPLH yang relatif luas. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan, tetapi mencakup pelayanan pengaduan, verifikasi masalah lingkungan, pengawasan izin lingkungan, tindak lanjut hasil evaluasi, penyelesaian sengketa, pembentukan tim koordinasi, dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat.

Dalam pengelolaan persampahan, strategi kelembagaan juga bergerak ke arah pengurangan sampah dan ekonomi sirkular. LKIP DPRKPLH menunjukkan adanya fungsi pembinaan bank sampah, kompos, *maggot*, pemanfaatan kembali sampah, serta fasilitas pendaurulangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah tidak hanya digunakan untuk mengangkut sampah menuju TPA, tetapi juga diarahkan pada pembentukan ekosistem pengurangan sampah di sumber.

Namun, kapasitas tersebut belum sepenuhnya bebas dari kendala. LKIP DPRKPLH mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain pemantauan kualitas air yang belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi wilayah karena keterbatasan frekuensi dan titik pantau, perubahan regulasi pemerintah pusat, kesulitan menangani *point source* maupun *non-point source pollution*, alih fungsi lahan, serta pertumbuhan penduduk. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan proses yang harus terus disesuaikan dengan perubahan tekanan ekologis dan regulatif.

Koordinasi Vertikal, Horizontal, dan Kolaborasi Multipihak

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi lingkungan Ciamis memiliki karakter multi-level dan multi-actor governance. Hubungan vertikal tampak dari keterkaitan program daerah dengan ProKlim nasional, kebijakan Provinsi Jawa Barat, KLHS, serta berbagai indikator nasional pengelolaan lingkungan. Pada saat yang sama, proses implementasi bergerak ke tingkat kecamatan, desa, sekolah, kelompok masyarakat, dan komunitas.

Pada dimensi horizontal, praktik lingkungan juga melibatkan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, sekolah, kelompok wanita tani, pengelola TPS3R, bank sampah, serta komunitas lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup pada 2026 bahkan menempatkan Ciamis sebagai lokasi pembelajaran pengelolaan sampah karena praktiknya memperlihatkan interaksi pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, penerima Kalpataru, sekolah, dan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih berfungsi sebagai orchestrator daripada sebagai satu-satunya pelaksana. Fungsi pemerintah mencakup pembentukan arah kebijakan, fasilitasi, pemberian insentif, penguatan kapasitas, pengawasan, serta penyediaan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan inisiatif pada tingkat lokal.

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Inti Implementasi

Salah satu temuan yang paling menonjol adalah kuatnya penggunaan pendekatan berbasis masyarakat. Pengelolaan lingkungan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi diperluas melalui perubahan perilaku dan pembentukan praktik kolektif. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggunakan kompetisi kebersihan antarkecamatan, pemberian penghargaan, gerakan Jumat Bersih, bank sampah, TPS3R, pemilahan sampah dari rumah, serta pelibatan sekolah dan UMKM untuk memperkuat kepedulian masyarakat.

Pengakuan ASEAN terhadap Ciamis pada 2025 juga mencatat beberapa inovasi berbasis masyarakat, seperti Sedekah Sampah, pembatasan penggunaan plastik pada kegiatan kurban, pemberian insentif kepada penabung sampah berprestasi, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan gas metana. Praktik tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah mengombinasikan instrumen regulatif, edukatif, sosial, dan insentif.

Pada program ProKlim, pola serupa terlihat dalam keterlibatan komunitas di tingkat tapak. Penghargaan Pembina ProKlim dan capaian ProKlim Lestari menunjukkan bahwa partisipasi lokal tidak sepenuhnya bersifat episodik. Program ini membangun ruang bagi komunitas untuk mengembangkan tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Monitoring, Pembelajaran, dan Keberlanjutan Program

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa capaian lingkungan Ciamis tidak dapat diperlakukan sebagai kondisi yang sudah final. Pada evaluasi pengelolaan sampah tahun 2025 yang diumumkan KLH/BPLH pada Februari 2026, Ciamis memperoleh nilai 74,68, tertinggi untuk kategori kabupaten dalam kelompok daerah yang memperoleh *Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih*. Namun, skor tersebut masih berada di bawah batas perolehan Adipura, dan secara nasional tidak terdapat daerah yang berhasil memperoleh Adipura maupun Adipura Kencana dalam penilaian 2025.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa penghargaan tahun sebelumnya tidak menjamin keberhasilan otomatis pada standar evaluasi berikutnya. Perubahan standar nasional memberikan tekanan bagi pemerintah untuk memperbarui strategi, kapasitas, sarana, pengelolaan sampah dari sumber, dan kualitas TPA secara terus-menerus. Dengan demikian, keberlanjutan program di Ciamis lebih tepat dipahami sebagai adaptive governance, yakni kemampuan mempertahankan capaian sambil merespons standar, masalah, dan tekanan baru.

Tabel 4. Sintesis Temuan Berdasarkan Dimensi Environmental Governance

Dimensi	Temuan utama	Kekuatan	Isu yang masih memerlukan penguatan
---------	--------------	----------	-------------------------------------

Integrasi kebijakan	RPPLH, KLHS, RPJMD, Renstra dan IKU mulai terhubung	Agenda lingkungan semakin terlembaga	Konsistensi implementasi lintas sektor
Kapasitas kelembagaan	Fungsi pengawasan, pengaduan, konservasi, persampahan dan monitoring tersedia	Mandat dan struktur relatif lengkap	Keterwakilan pemantauan kualitas air; perubahan regulasi
Koordinasi	Hubungan pusat–provinsi–kabupaten–kecamatan–desa	Menghubungkan berbagai skala pemerintahan	Potensi fragmentasi kewenangan
Kolaborasi	Pemerintah, komunitas, sekolah, usaha, TPS3R, bank sampah, KWT	Membentuk jaringan pelaksana yang luas	Keberlanjutan komitmen dan pembagian peran
Partisipasi	Pemilahan dari sumber, Jumat Bersih, ProKlim, Sedekah Sampah, kompetisi	Kepemilikan sosial terhadap program	Menjaga partisipasi tetap substantif
Monitoring dan pembelajaran	IKLH, evaluasi kinerja, penilaian Adipura dan ProKlim	Terdapat umpan balik kinerja	Adaptasi terhadap standar baru dan tekanan ekologis

Sumber: Hasil sintesis penelitian dari dokumen dan data resmi Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan KLH/BPLH.

Pembahasan

Dari Program Lingkungan Menuju Pelembagaan Environmental Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kekuatan strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis terletak pada peningkatan institutionalisation of environmental concerns. Keberadaan RPPLH, KLHS, indikator kinerja lingkungan, serta integrasi agenda lingkungan dalam RPJMD menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya dijalankan melalui proyek temporer. Kondisi tersebut selaras dengan Heinen et al. (2022), yang menekankan bahwa *environmental governance* perlu dipahami melalui hubungan antara persoalan yang saling bergantung, pusat-pusat pengambilan keputusan, aturan yang digunakan, bentuk interaksi, dan tingkat ketergantungan antarpengambil keputusan. Dalam kasus Ciamis, keberadaan instrumen formal memberikan kerangka yang memungkinkan agenda lingkungan bergerak melintasi organisasi dan periode perencanaan.

Temuan ini juga memberikan perspektif penting terhadap studi Ratnasari et al. (2023), yang menemukan bahwa dinamika kebijakan nasional dan lokal dapat menentukan keberhasilan agenda keberlanjutan di Indonesia. Pengalaman Ciamis menunjukkan bahwa koherensi tidak hanya membutuhkan kepatuhan daerah terhadap kebijakan pusat, tetapi kemampuan menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program lokal seperti ProKlim, pengelolaan persampahan, Adiwiyata, pengendalian pencemaran, dan pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, policy coherence dalam *environmental governance* bukan hanya kesesuaian dokumen, tetapi kemampuan menghubungkan mandat kebijakan dengan struktur implementasi pada tingkat lokal.

Pemerintah Daerah sebagai Orchestrator dan Enabler

Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan relatif Ciamis tidak sepenuhnya dijelaskan oleh besarnya kapasitas pemerintah untuk melakukan intervensi secara langsung. Pemerintah lebih banyak mengambil peran sebagai pengarah, fasilitator, penghubung, pemberi insentif, dan pembentuk norma kolektif. Kompetisi kebersihan antarkecamatan, penghargaan kepada aktor lingkungan, dukungan terhadap bank sampah dan TPS3R, serta pengembangan ProKlim memperlihatkan penggunaan kombinasi instrumen formal dan sosial. Pola tersebut memperkuat pandangan Pivo et al. (2020) bahwa perubahan kebijakan lingkungan lokal merupakan produk interaksi antara kepemimpinan, kapasitas organisasi, desain inovasi, konteks, dan dukungan aktor.

Temuan tersebut juga sejalan dengan McNaught (2024), yang dalam tinjauan global menemukan bahwa efektivitas *collaborative governance* di tingkat lokal bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan yang luas, kepemimpinan kolaboratif, fasilitasi, akses terhadap pengetahuan, serta kemampuan berbagi sumber daya. Dalam konteks Ciamis, strategi pemerintah menjadi efektif ketika kapasitas birokrasi dikombinasikan dengan sumber daya sosial masyarakat. Dengan kata lain, *governance capacity* tidak identik dengan *government capacity*; kapasitas tata kelola justru berkembang ketika pemerintah mampu mengaktivasi kapasitas yang tersebar pada desa, komunitas, sekolah, kelompok masyarakat, dan dunia usaha.

Partisipasi Masyarakat sebagai Co-production of Environmental Outcomes

Kekuatan lain dari strategi Ciamis adalah perubahan posisi masyarakat dari penerima program menjadi bagian dari proses produksi hasil lingkungan. Pemilahan sampah pada sumber, pengoperasian bank sampah, TPS3R, kegiatan Jumat Bersih, Sedekah Sampah, serta ProKlim memperlihatkan bahwa sebagian tanggung jawab pengelolaan lingkungan telah didistribusikan hingga tingkat rumah tangga dan komunitas. Temuan ini konsisten dengan Wu et al. (2020), yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lingkungan akan lebih kuat ketika tindakan pemerintah berjalan bersama dengan partisipasi publik.

Namun demikian, kualitas partisipasi tidak hanya dapat diukur melalui banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan. Glaas et al. (2022) menekankan bahwa partisipasi yang transformatif mensyaratkan kapasitas organisasi pemerintah untuk menghubungkan masukan warga dengan proses kebijakan, memperjelas tanggung jawab, dan mendesain mekanisme keterlibatan secara bermakna. Oleh karena itu, tantangan lanjutan bagi Ciamis adalah mentransformasikan partisipasi berbasis kegiatan menjadi *institutionalised co-governance*, yakni kondisi ketika masyarakat tidak hanya terlibat membersihkan dan memilah sampah, tetapi juga memperoleh ruang dalam identifikasi masalah, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan inovasi lingkungan.

Multi-level Governance dan Pentingnya Menjembatani Fragmentasi

Implementasi program lingkungan Ciamis menunjukkan karakter *multi-level governance*. Program ProKlim, KLHS, Adipura, pengelolaan sampah, dan indikator lingkungan menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan komunitas. Temuan tersebut sesuai dengan Heinen et al. (2022), yang menjelaskan bahwa persoalan lingkungan secara inheren bersifat

interdependen sehingga tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu pusat kewenangan.

Akan tetapi, banyaknya aktor juga meningkatkan risiko fragmentasi. Hamilton et al. (2021) menunjukkan bahwa *collaboration gaps* dapat muncul bahkan di antara organisasi yang secara objektif saling bergantung. Hal tersebut relevan dengan Ciamis mengingat isu lingkungan bersinggungan dengan perencanaan pembangunan, tata ruang, pertanian, permukiman, industri, pendidikan, pemerintahan desa, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, kekuatan tata kelola Ciamis pada masa depan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aktor yang terlibat, tetapi oleh kualitas hubungan antarpusat keputusan, kejelasan peran, kontinuitas komunikasi, mekanisme penyelesaian konflik, dan kemampuan berbagi data serta sumber daya.

Capaian Lingkungan sebagai Hasil Governance, Bukan Sekadar Penghargaan

Kenaikan IKLH, meningkatnya sampah yang tertangani, penurunan jumlah kendaraan pengangkut sampah menuju TPA, bertambahnya lokasi Kampung Iklim, serta berbagai pengakuan nasional dan regional menunjukkan adanya hasil nyata dari strategi yang diterapkan. Temuan tersebut mendukung Ningrum et al. (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan agenda keberlanjutan lokal berkaitan dengan sumber daya yang dapat diandalkan, perencanaan yang mendukung, kompetensi lokal, dan kepercayaan antarpemangku kepentingan. Dalam kasus Ciamis, kombinasi kapasitas pemerintah dengan modal sosial masyarakat tampaknya menjadi salah satu mekanisme penting yang menghubungkan strategi dengan hasil lingkungan.

Namun, hasil evaluasi Adipura 2025 memberikan koreksi penting terhadap interpretasi keberhasilan. Ciamis memang menjadi kabupaten dengan skor tinggi, yaitu 74,68, tetapi belum memenuhi ambang Adipura di bawah standar penilaian baru. Fakta ini menunjukkan bahwa penghargaan harus diperlakukan sebagai intermediate outcome, bukan tujuan akhir tata kelola. Keberhasilan sejati adalah kemampuan mempertahankan perubahan ketika standar naik, kepemimpinan berubah, sumber daya terbatas, dan tekanan ekologis berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan penghargaan sebagai bukti final efektivitas *environmental governance*, melainkan sebagai salah satu indikator dalam proses pembelajaran kebijakan.

Tantangan Keberlanjutan dan Risiko Symbolic Compliance

Walaupun menunjukkan sejumlah capaian positif, hasil penelitian juga mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan representativitas pemantauan kualitas air, perubahan regulasi nasional, pencemaran dari sumber tertentu dan tidak tertentu, perubahan penggunaan lahan, serta pertumbuhan penduduk memperlihatkan bahwa tekanan ekologis terus berkembang. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis kebersihan dan partisipasi harus dilengkapi dengan kapasitas analitik, monitoring ekologi, pengendalian tata ruang, pengawasan pencemaran, dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.

Temuan ini penting jika dikaitkan dengan Muallidin (2026), yang memperingatkan adanya tiga bentuk kegagalan institusional ekologis pada pemerintah daerah Indonesia, yaitu *symbolic compliance*, *structural disjunction*, dan *inertial governance*. Kasus Ciamis memperlihatkan kondisi yang relatif berbeda karena terdapat indikasi hasil substantif, khususnya pada pengurangan sampah, partisipasi

masyarakat, dan peningkatan beberapa indikator lingkungan. Namun, kerangka Muallidin tetap relevan sebagai peringatan agar banyaknya dokumen, program, dan penghargaan tidak menggantikan pengukuran dampak ekologis yang sesungguhnya. Karena itu, tahap perkembangan berikutnya bagi Ciamis adalah memperkuat outcome-oriented environmental governance, yaitu tata kelola yang semakin menilai keberhasilan berdasarkan kualitas air, udara, lahan, pengurangan emisi, pengurangan residu, ketahanan iklim, dan perubahan perilaku jangka panjang.

Sintesis: Model Strategi Environmental Governance Kabupaten Ciamis

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dirumuskan sebagai model tata kelola lingkungan berbasis orkestrasi institusional dan mobilisasi sosial. Pemerintah tidak hanya menggunakan regulasi dan program, tetapi mengintegrasikan enam mekanisme yang saling berkaitan, meliputi integrasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi multilevel, kolaborasi multipihak, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan pembelajaran. Keenam mekanisme tersebut bersifat saling bergantung; kelemahan pada satu dimensi berpotensi menurunkan keberlanjutan dimensi lainnya.

Secara teoretis, temuan ini memperluas diskusi *environmental governance* dengan menunjukkan bahwa pada konteks kabupaten di Indonesia, kapasitas lingkungan dapat dibangun bukan semata-mata melalui penguatan birokrasi, melainkan melalui kemampuan pemerintah mengubah sumber daya sosial menjadi kapasitas tata kelola. Ciamis memperlihatkan bahwa kebiasaan masyarakat, gotong royong, kompetisi sosial, insentif, organisasi komunitas, sekolah, dan jaringan lokal dapat diorkestrasi menjadi instrumen kebijakan lingkungan. Akan tetapi, keberlanjutan model tersebut mensyaratkan peningkatan kualitas data ekologis, koordinasi lintas sektor, pelembagaan partisipasi, adaptasi terhadap perubahan regulasi, dan evaluasi berbasis hasil lingkungan substantif.

Tabel 5. Model Strategi Environmental Governance Kabupaten Ciamis

Tahap strategis	Mekanisme utama	Output tata kelola	Outcome yang diharapkan
Integrasi kebijakan	RPJMD, RPPLH, KLHS, Renstra, IKU	Koherensi arah kebijakan	Agenda lingkungan terlembaga
Penguatan institusi	SDM, regulasi, pengawasan, pengaduan, sumber daya	Kapasitas implementasi	Respons pemerintah meningkat
Koordinasi multilevel	Pusat-provinsi-kabupaten-desa	Sinkronisasi program	Berkurangnya fragmentasi
Kolaborasi multipihak	Pemerintah-masyarakat-usaha-sekolah-komunitas	Berbagi sumber daya dan pengetahuan	Kapasitas kolektif meningkat
Pemberdayaan masyarakat	ProKlim, TPS3R, bank sampah, Jumat Bersih, insentif	Perubahan perilaku dan kepemilikan sosial	Aksi lingkungan berkelanjutan
Monitoring dan pembelajaran	IKLH, evaluasi kinerja, ProKlim	Umpan balik kebijakan	Adaptasi dan perbaikan berkelanjutan

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam implementasi program lingkungan berkelanjutan telah berkembang menuju pola *environmental governance* yang tidak hanya bertumpu pada kapasitas birokrasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan kebijakan, membangun koordinasi antartingkat pemerintahan, mengembangkan kolaborasi multipihak, serta memobilisasi partisipasi masyarakat. Integrasi agenda lingkungan ke dalam RPPLH, KLHS, RPJMD, rencana strategis perangkat daerah, dan indikator kinerja menunjukkan bahwa isu lingkungan semakin memperoleh tempat dalam sistem perencanaan dan kelembagaan daerah. Pada tingkat implementasi, berbagai praktik seperti Program Kampung Iklim, TPS3R, bank sampah, pemilahan sampah dari sumber, kegiatan kebersihan berbasis masyarakat, serta keterlibatan sekolah, komunitas, dan pelaku usaha memperlihatkan bahwa pemerintah mulai menjalankan peran sebagai *orchestrator* dan *enabler* dalam membangun tindakan kolektif. Perkembangan indikator kualitas lingkungan, peningkatan proporsi sampah yang tertangani, serta berbagai pengakuan pada tingkat nasional dan regional memperkuat indikasi bahwa strategi tersebut telah menghasilkan capaian yang nyata. Namun, keberhasilan tersebut belum dapat dipandang sebagai kondisi yang final karena masih terdapat persoalan terkait kualitas pemantauan lingkungan, tekanan pencemaran, perubahan regulasi, alih fungsi lahan, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi keberlanjutan program. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa keberhasilan relatif tata kelola lingkungan Kabupaten Ciamis dibentuk melalui orkestrasi institusional dan mobilisasi sosial, yaitu kemampuan pemerintah menghubungkan kebijakan, kapasitas kelembagaan, koordinasi multilevel, kolaborasi, partisipasi masyarakat, serta pembelajaran adaptif untuk menghasilkan keluaran lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil. Pertama, penelitian menggunakan desain studi kasus pada Kabupaten Ciamis sehingga temuan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan, sosial, budaya, serta dinamika kebijakan daerah tersebut dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, sebagian besar bukti yang dianalisis berasal dari dokumen perencanaan, laporan kinerja, regulasi, serta informasi resmi pemerintah sehingga terdapat kemungkinan bahwa dimensi informal tata kelola, konflik kepentingan, pengalaman kelompok masyarakat tertentu, maupun praktik implementasi yang tidak terdokumentasi belum sepenuhnya tergambarkan. Ketiga, sejumlah indikator lingkungan yang digunakan menggambarkan perkembangan kinerja secara agregat sehingga belum mampu menjelaskan secara rinci variasi kualitas implementasi antarwilayah, antardesa, maupun antarprogram. Selain itu, penelitian belum secara khusus mengukur dampak ekologis jangka panjang dari setiap program, seperti perubahan kualitas air, pengurangan emisi gas rumah kaca, perubahan volume residu secara longitudinal, maupun ketahanan program setelah terjadi perubahan kepemimpinan dan kebijakan. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi relevansi temuan, tetapi menunjukkan bahwa hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai penjelasan mendalam mengenai mekanisme tata kelola dan strategi implementasi dibandingkan sebagai evaluasi kausal terhadap seluruh dampak lingkungan Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kabupaten Ciamis disarankan untuk memperkuat implementasi *environmental governance* melalui pergeseran dari tata kelola yang berorientasi pada program dan capaian administratif menuju tata kelola berbasis hasil ekologis dan keberlanjutan kelembagaan. Integrasi RPPLH, KLHS, RPJMD, rencana strategis perangkat daerah, dan kebijakan tingkat desa perlu diperkuat melalui indikator lintas sektor yang terukur serta mekanisme evaluasi bersama agar agenda lingkungan tidak menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sistem monitoring lingkungan melalui perluasan titik dan frekuensi pemantauan, penguatan basis data lingkungan yang terintegrasi, serta pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar koreksi kebijakan. Pada tingkat kolaborasi, keberadaan ProKlim, bank sampah, TPS3R, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan kelompok masyarakat perlu dikembangkan menjadi jejaring tata kelola yang lebih terinstitusionalisasi dengan pembagian peran, mekanisme koordinasi, insentif, dan evaluasi yang jelas. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dari keterlibatan dalam pelaksanaan program menuju keterlibatan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan inovasi sehingga masyarakat benar-benar berfungsi sebagai *co-producer* dalam pencapaian hasil lingkungan. Pemerintah daerah pada akhirnya perlu menjaga agar keberhasilan lingkungan tidak bergantung pada penghargaan maupun figur kepemimpinan tertentu, tetapi tertanam dalam regulasi, kelembagaan, pembiayaan, budaya organisasi, dan perilaku masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif antara Kabupaten Ciamis dan daerah lain yang memiliki karakteristik maupun tingkat capaian lingkungan berbeda agar dapat diketahui sejauh mana model orkestrasi institusional dan mobilisasi sosial dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif longitudinal untuk menguji hubungan antara kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, kolaborasi multipihak, dan perubahan indikator ekologis. Kajian yang lebih spesifik mengenai efektivitas ProKlim, bank sampah, TPS3R, tata kelola kualitas air, ekonomi sirkular, maupun mekanisme kolaborasi pemerintah-masyarakat juga diperlukan untuk mengidentifikasi program mana yang memberikan dampak lingkungan paling berkelanjutan. Dengan pengembangan tersebut, penelitian tentang *environmental governance* tidak hanya dapat menjelaskan proses tata kelola, tetapi juga menghasilkan bukti yang lebih kuat mengenai hubungan antara kualitas institusi, tindakan kolektif, dan capaian ekologis pada tingkat pemerintah daerah.

6. Daftar Pustaka

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. doi: 10.1080/14780887.2020.1769238
- Citarum Harum Juara. (2025, December 3). *Kabupaten Ciamis kembali raih penghargaan ProKlim 2025 dari Kementerian LH*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Dalglis, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A. (2020). Document analysis in health policy research: The READ approach. *Health Policy and Planning*, 35(10), 1424–1431. doi: 10.1093/heapol/czaa064

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (2026). *Jumlah Kampung Iklim berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat* [Data set]. Open Data Jawa Barat.
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. (2025a). *Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. (2025b). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024*. Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Glaas, E., Hjerpe, M., Wihlborg, E., & Storbjörk, S. (2022). Disentangling municipal capacities for citizen participation in transformative climate adaptation. *Environmental Policy and Governance*, 32(3), 179–191. doi: 10.1002/eet.1982
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. doi: 10.1371/journal.pone.0232076
- Hamilton, M., Fischer, A. P., & Jasny, L. (2021). Bridging collaboration gaps in fragmented environmental governance systems. *Environmental Science & Policy*, 124, 461–470. doi: 10.1016/j.envsci.2021.07.014
- Heinen, D., Arlati, A., & Knieling, J. (2022). Five dimensions of climate governance: A framework for empirical research based on polycentric and multi-level governance perspectives. *Environmental Policy and Governance*, 32(1), 56–68. doi: 10.1002/eet.1963
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.114523
- Kallio, H., Pietilä, A.-M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965. doi: 10.1111/jan.13031
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2025, September 9). *5 daerah Indonesia raih penghargaan bergengsi di The 6th ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2025*.
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2026a, February 27). *KLH/BPLH tetapkan hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota tahun 2025*.
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2026b, August 12). *KLH ajak generasi muda bongkar rahasia sukses warga Ciamis kelola sampah lewat KELANA*.
- Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760. doi: 10.1177/1049732315617444
- McNaught, R. (2024). The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development—A global review. *Environmental Science & Policy*, 151, 103627. doi: 10.1016/j.envsci.2023.103627
- Muallidin, I. (2026). Ecological institutional failure in local governments: Rethinking environmental governance in decentralized Indonesia. *Environmental Policy and Governance*, 1–15. doi: 10.1002/eet.70106

- Ningrum, D., Malekpour, S., Raven, R., & Moallemi, E. A. (2022). Lessons learnt from previous local sustainability efforts to inform local action for the Sustainable Development Goals. *Environmental Science & Policy*, 129, 45–55. doi: 10.1016/j.envsci.2021.12.018
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. doi: 10.1177/1609406917733847
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2024a). *Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2024b). *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045*.
- Pemerintah Kabupaten Ciamis. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029*.
- Pivo, G., Henry, A. D., & Berger, L. (2020). Essential elements at play in local environmental policy change: A guide for the perplexed. *Environmental Science & Policy*, 106, 240–249. doi: 10.1016/j.envsci.2020.01.023
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. G. H. (2023). Enhancing sustainability development for waste management through national–local policy dynamics. *Sustainability*, 15(8), 6560. doi: 10.3390/su15086560
- Ridder, H.-G. (2017). The theory contribution of case study research designs. *Business Research*, 10(2), 281–305. doi: 10.1007/s40685-017-0045-z
- Wu, L., Ma, T., Bian, Y., Li, S., & Yi, Z. (2020). Improvement of regional environmental quality: Government environmental governance and public participation. *Science of the Total Environment*, 717, 137265. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137265